



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 069/Kep.787-BKD/2020
TENTANG

JABATAN KRITIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berdasarkan sistem merit serta pelaksanaan dari manajemen talenta bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan jabatan kritikal sebagai posisi strategis dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jabatan Kritikal di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 58);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jabatan Kritisal di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat serta pembangunan nasional dengan memperhatikan sistem manajemen talenta, pengembangan kompetensi dan kualifikasi hasil pemetaan manajemen talenta serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemetaan manajemen talenta.
- KETIGA : Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu:
- a. perangkat daerah strategis;
 - b. daftar jabatan strategis;
 - c. pelaksana program strategis/juara; dan
 - d. nilai anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 069/Kep.787-BKD/2020

TANGGAL : 27 November 2020

TENTANG : JABATAN KRITIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

NO	ESELON	BOBOT	SATUAN KERJA	UNIT KERJA	NAMA JABATAN
10	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN I	KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN I
24	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA III	KEPALA SUBBIDANG BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA III
36	III.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
56	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN III	KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN III
70	III.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BIDANG ANGGARAN	KEPALA BIDANG ANGGARAN
73	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN II	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN II
91	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN I	KEPALA SUBBIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN I
92	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN III	KEPALA SUBBIDANG BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN III
94	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN III	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN III
100	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN II	KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN II
102	III.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
104	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA I	KEPALA SUBBIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA I
127	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
130	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN II	KEPALA SUBBIDANG BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN II
147	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI	KEPALA SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
152	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN I	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN I
155	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG ANGGARAN I	KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN I
157	III.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
160	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG ANGGARAN II	KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN II
164	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
167	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM II	KEPALA SUBBIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM II

191	III.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
197	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM I	KEPALA SUBBIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM I
214	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN	KEPALA SUBBIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN
217	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN	KEPALA SUBBIDANG PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN
222	III.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
224	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
225	III.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
240	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA II	KEPALA SUBBIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA II
252	IV.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG ANGGARAN III	KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN III
263	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
275	III.a	5.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BIDANG PERBENDAHARAAN	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
277	III.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
280	III.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
295	IV.a	5.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM III	KEPALA SUBBIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM III
4	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIANJUR	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIANJUR
12	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG
17	IV.a	4.80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP KEPEGAWAIAN	KEPALA SUBBIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP KEPEGAWAIAN
26	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANJAR	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANJAR
40	III.a	4.80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
41	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT LAYANAN OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH	KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH
44	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON II CILEDUG	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON II CILEDUG
50	III.a	4.80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
55	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI II PELABUHAN RATU	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI II PELABUHAN RATU
62	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN GARUT	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN GARUT
63	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BOGOR	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BOGOR
71	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUBANG	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUBANG

79	III.a	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BIDANG PENDAPATAN II	KEPALA BIDANG PENDAPATAN II
90	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN
112	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK
119	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG II SOREANG	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG II SOREANG
122	IV.a	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	SUBBAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
124	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU I	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU I
131	IV.a	4.80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN KARIR JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI
137	III.a	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
139	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BEKASI	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BEKASI
141	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BOGOR	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BOGOR
144	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA
145	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KARAWANG	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KARAWANG
149	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON I SUMBER	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON I SUMBER
158	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN
170	III.a	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BIDANG PENDAPATAN I	KEPALA BIDANG PENDAPATAN I
176	IV.a	4.80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUB BIDANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	KEPALA SUBBIDANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
179	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIMAHI	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIMAHI
182	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
202	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA TASIKMALAYA	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
209	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN
211	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG I PAJAJARAN	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG I PAJAJARAN
228	IV.a	4.80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR FUNGSIONAL	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN KARIR FUNGSIONAL
230	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIREBON	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIREBON
235	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BEKASI	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BEKASI

237	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU II HAURGEULIS	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU II HAURGEULIS
251	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK I	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK I
256	III.a	4.80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR
261	IV.a	4.80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUB BIDANG PEMETAAN KOMPETENSI DAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA	KEPALA SUBBIDANG PEMETAAN KOMPETENSI DAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
262	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK
269	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA
271	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA
276	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK II CINERE	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK II CINERE
279	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
281	III.a	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
283	IV.a	4.80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
286	III.a	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
288	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIAMIS	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
311	III.b	4.80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI	KEPALA UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI
6	III.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
8	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV
19	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN
22	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI KESEJAHTERAAN	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
23	III.a	3.90	DINAS KESEHATAN	DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
32	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
34	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
35	III.a	3.90	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG ADMINISTRASI	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG ADMINISTRASI
38	III.b	3.90	DINAS KESEHATAN	BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI (AL-IHSAN)
39	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
42	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN
46	III.b	3.90	DINAS KESEHATAN	BAGIAN TATA USAHA	KEPALA BAGIAN TATA USAHA
49	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III

51	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI LAYANAN DAN PROMOSI	KEPALA SEKSI LAYANAN DAN PROMOSI
53	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SUBBAGIAN KEUANGAN	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
54	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PENGELOLAAN	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN
57	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
58	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI PENGEMBANGAN DAN MUTU PELAYANAN MEDIS	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN MUTU PELAYANAN MEDIS
59	III.b	3.90	DINAS KESEHATAN	BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KEPALA BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN (RS PARU)
66	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
67	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI MUTU PELAYANAN KESEHATAN	KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN KESEHATAN
68	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN	KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
72	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII
74	III.a	3.90	DINAS KESEHATAN	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
80	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI SARANA	KEPALA SEKSI SARANA
82	III.a	3.90	DINAS KESEHATAN	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
84	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
86	III.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
87	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI
96	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN LAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN LAPORAN (RS PARU)
97	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
105	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI	KEPALA SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI (RS PARU)
106	III.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
113	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
116	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
121	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
123	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN
126	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
133	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
135	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI PELAYANAN MEDIS	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS
140	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
148	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SUBBAGIAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	KEPALA SUBBAGIAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN (RS PARU)
151	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SUBBAGIAN KEUANGAN	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN (AL-IHSAN)

154	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN
156	IV.a	3.90	INSPEKTORAT DAERAH	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
161	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
165	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN
168	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN
169	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL
175	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
185	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN
186	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI
188	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
192	III.a	3.90	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KHUSUS	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KHUSUS
193	III.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
194	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	KEPALA BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
196	III.a	3.90	INSPEKTORAT DAERAH	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
198	III.a	3.90	DINAS KESEHATAN	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
203	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN PENYAKIT JIWA	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN PENYAKIT JIWA
207	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII
210	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X
212	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PENGEMBANGAN	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
218	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN
248	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN
250	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
253	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
264	III.a	3.90	DINAS KESEHATAN	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
265	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN
267	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX
268	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II
270	III.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
278	III.b	3.90	DINAS PENDIDIKAN	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I	KEPALA CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I
284	III.a	3.90	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
292	IV.a	3.90	DINAS KESEHATAN	SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI

299	III.a	3.90	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
302	IV.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN
309	III.a	3.90	DINAS PENDIDIKAN	BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	KEPALA BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
16	IV.a	3.30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKSI INTEGRASI INTEROPERABILITAS	KEPALA SEKSI INTEGRASI INTEROPERABILITAS
27	IV.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
31	IV.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN RUANG
65	III.b	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN II	KEPALA UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN II
78	III.b	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I	KEPALA UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I
88	III.a	3.30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BIDANG E-GOVERNMENT	KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT
89	IV.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	SEKSI PEMELIHARAAN	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN BIDANG PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN
111	III.b	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN VI	KEPALA UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN VI
120	III.b	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV	KEPALA UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV
129	III.b	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V	KEPALA UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V
146	IV.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
163	III.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
166	IV.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
174	IV.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
180	III.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	BIDANG JASA KONSTRUKSI	KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI
181	III.a	3.30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
189	IV.a	3.30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKSI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
226	III.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	BIDANG PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN	KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN
229	IV.a	3.30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKSI PENGELOLAAN APLIKASI	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN APLIKASI
232	IV.a	3.30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKSI TATA KELOLA	KEPALA SEKSI TATA KELOLA
233	IV.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	SEKSI PEMBANGUNAN	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
239	III.a	3.30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
249	III.b	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN III	KEPALA UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN III
293	IV.a	3.30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
303	III.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	BIDANG PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG
305	IV.a	3.30	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG
308	IV.a	3.30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKSI LAYANAN INFRASTRUKTUR	KEPALA SEKSI LAYANAN INFRASTRUKTUR

15	III.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
20	IV.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA
25	IV.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
29	III.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BIDANG BINA DESA	KEPALA BIDANG BINA DESA
61	III.a	3.10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	BIDANG INDUSTRI PARIWISATA	KEPALA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA
69	IV.a	3.10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA
101	IV.a	3.10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DISPARBUD
107	III.a	3.10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	BIDANG DESTINASI PARIWISATA	KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA
108	IV.a	3.10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
115	IV.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KEPALA SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
117	IV.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
136	IV.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKSI BINA PEMASARAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	KEPALA SEKSI BINA PEMASARAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
153	IV.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKSI BINA PENGEMBANGAN MODAL USAHA EKONOMI MASYARAKAT	KEPALA SEKSI BINA PENGEMBANGAN MODAL USAHA EKONOMI MASYARAKAT
183	IV.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SEKRETARIAT DPMDES
215	IV.a	3.10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SEKSI PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA
220	IV.a	3.10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
242	IV.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKSI BINA LEMBAGA USAHA EKONOMI MASYARAKAT	KEPALA SEKSI BINA LEMBAGA USAHA EKONOMI MASYARAKAT
247	III.a	3.10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
257	IV.a	3.10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SEKSI PENGEMBANGAN WISATA ALAM DAN BUATAN	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN WISATA ALAM DAN BUATAN
273	III.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
290	IV.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKSI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN	KEPALA SEKSI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
291	IV.a	3.10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SEKSI INDUSTRI KREATIF	KEPALA SEKSI INDUSTRI KREATIF
296	III.a	3.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
33	III.a	3.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
37	III.b	3.00	DINAS SUMBER DAYA AIR	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITARUM	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITARUM
52	III.a	3.00	DINAS PERHUBUNGAN	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
60	IV.a	3.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	SEKSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
93	III.a	3.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KEPALA BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
99	IV.a	3.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	SEKSI PEMBIAYAAN USAHA KECIL	KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN USAHA KECIL

103	IV.a	3.00	DINAS SUMBER DAYA AIR	SEKSI SUNGAI DANAU WADUK DAN PANTAI	KEPALA SEKSI SUNGAI DANAU WADUK DAN PANTAI
110	IV.a	3.00	DINAS PERHUBUNGAN	SEKSI LALU LINTAS DAN KESELAMATAN	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN KESELAMATAN
138	III.b	3.00	DINAS SUMBER DAYA AIR	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE
150	III.b	3.00	DINAS PERHUBUNGAN	UPTD PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN NUSAWIRU	KEPALA UPTD PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN NUSAWIRU
159	III.b	3.00	DINAS SUMBER DAYA AIR	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO
171	III.b	3.00	DINAS SUMBER DAYA AIR	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG
200	IV.a	3.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	SEKSI PEMBIAYAAN KOPERASI	KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN KOPERASI
208	IV.a	3.00	DINAS PERHUBUNGAN	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
213	IV.a	3.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	SEKSI USAHA SIMPAN PINJAM	KEPALA SEKSI USAHA SIMPAN PINJAM
231	III.b	3.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH TPA/TPST REGIONAL	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH TPA/TPST REGIONAL
236	III.a	3.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	BIDANG USAHA KECIL	KEPALA BIDANG USAHA KECIL
243	IV.a	3.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	SEKSI INOVASI PRODUKSI DAN SISTEM INFORMASI	KEPALA SEKSI INOVASI PRODUKSI DAN SISTEM INFORMASI
245	III.b	3.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN WIRUSAHA	KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN WIRUSAHA
258	IV.a	3.00	DINAS PERHUBUNGAN	SEKSI ANGKUTAN DARAT	KEPALA SEKSI ANGKUTAN DARAT
260	III.a	3.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
272	III.a	3.00	DINAS PERHUBUNGAN	BIDANG TRANSPORTASI DARAT	KEPALA BIDANG TRANSPORTASI DARAT
282	IV.a	3.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN
287	III.a	3.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
307	III.b	3.00	DINAS SUMBER DAYA AIR	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI
3	IV.a	2.90	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	SEKSI PEMBIAYAAN PERTANIAN	KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN PERTANIAN
9	III.a	2.90	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
43	IV.a	2.90	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SEKSI SARANA KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SEKSI SARANA KAWASAN PERMUKIMAN
48	IV.a	2.90	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SEKSI RUMAH KHUSUS DAN SWADAYA	KEPALA SEKSI RUMAH KHUSUS DAN SWADAYA
85	III.a	2.90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
114	IV.a	2.90	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SEKSI PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN	KEPALA SEKSI PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
177	IV.a	2.90	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
184	III.a	2.90	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BIDANG PRASARANA DAN SARANA	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA
206	III.a	2.90	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
227	III.a	2.90	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	BIDANG PERUMAHAN	KEPALA BIDANG PERUMAHAN
234	IV.a	2.90	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

259	IV.a	2.90	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SEKSI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
274	III.a	2.90	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BIDANG PENYULUHAN	KEPALA BIDANG PENYULUHAN
306	IV.a	2.90	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	SEKSI PENGOLAHAN LAHAN DAN AIR	KEPALA SEKSI LAHAN DAN AIR
310	IV.a	2.90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
312	III.a	2.90	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
7	III.a	2.80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
75	IV.a	2.80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA
187	IV.a	2.80	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	SEKSI SUMBER DAYA DAN CADANGAN PANGAN	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA DAN CADANGAN PANGAN
199	III.a	2.80	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
205	IV.a	2.80	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
219	III.a	2.80	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI	KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI
289	IV.a	2.80	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
77	III.a	2.50	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL
266	III.a	2.50	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
178	III.a	2.30	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
246	III.a	2.30	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
21	III.a	2.10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
132	III.a	2.00	DINAS SOSIAL	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
64	IV.a	1.90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
241	III.a	1.40	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
1	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
2	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN KERJASAMA	KEPALA BAGIAN KERJASAMA
5	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PUBLIKASI	KEPALA SUBBAGIAN PUBLIKASI
11	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PENATA ACARA KEPROTOKOLAN	KEPALA SUBBAGIAN PENATA ACARA KEPROTOKOLAN
13	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN URUSAN DALAM	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM
14	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PUBLIKASI PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI	KEPALA BAGIAN PUBLIKASI PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI
18	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	KEPALA BAGIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
28	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
30	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PENANGGULANGAN MASALAH DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	KEPALA BAGIAN PENANGGULANGAN MASALAH DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
45	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

47	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR
76	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PENDIDIKAN	KEPALA SUBBAGIAN PENDIDIKAN
81	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN KETATAUSAHAAN PIMPINAN	KEPALA SUBBAGIAN KETATAUSAHAAN PIMPINAN
83	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
95	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN INVESTASI DAERAH	KEPALA BAGIAN INVESTASI DAERAH
98	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PENGELOLAAN SISTEM SECARA ELEKTRONIK	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN SISTEM SECARA ELEKTRONIK
109	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH NON LEMBAGA KEUANGAN	KEPALA SUBBAGIAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH NON LEMBAGA KEUANGAN
118	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PELAYANAN SOSIAL	KEPALA BAGIAN PELAYANAN SOSIAL
125	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN KEPENDUDUKAN, PERTANAHAN, DAN PEMERINTAHAN DESA	KEPALA SUBBAGIAN KEPENDUDUKAN, PERTANAHAN, DAN PEMERINTAHAN DESA
128	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
134	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH LEMBAGA KEUANGAN	KEPALA SUBBAGIAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH LEMBAGA KEUANGAN
142	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN BINA MENTAL DAN KEROHANIAN	KEPALA SUBBAGIAN BINA MENTAL DAN KEROHANIAN
143	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH LEMBAGA KEUANGAN	KEPALA SUBBAGIAN KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH LEMBAGA KEUANGAN
162	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI	KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI
172	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA	KEPALA SUBBAGIAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA
173	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN ANALISIS HUKUM	KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN ANALISIS HUKUM
190	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH NON LEMBAGA KEUANGAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH NON LEMBAGA KEUANGAN
195	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN KERJASAMA DALAM NEGERI	KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA DALAM NEGERI
201	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	KEPALA SUBBAGIAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
204	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PELAYANAN MEDIA INFORMASI	KEPALA BAGIAN PELAYANAN MEDIA INFORMASI
216	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
221	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH NON LEMBAGA KEUANGAN	KEPALA SUBBAGIAN KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH NON LEMBAGA KEUANGAN
223	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN
238	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN FASILITASI PEMERINTAHAN UMUM	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI PEMERINTAHAN UMUM
244	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN EVALUASI KERJASAMA	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI KERJASAMA
254	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI	KEPALA SUBBAGIAN PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI

255	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN PELAYANAN MEDIA	KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN MEDIA
285	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
294	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
297	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
298	III.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN KEPROTOKOLAN	KEPALA BAGIAN KEPROTOKOLAN
300	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
301	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI	KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI
304	IV.a	1.20	SEKRETARIAT DAERAH	SUBBAGIAN INOVASI PEMBIAYAAN	KEPALA SUBBAGIAN INOVASI PEMBIAYAAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL